

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling*, dimana total populasi 87 desa di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan populasi pada penelitian ini. Sampel pada penelitian ini adalah 30 desa yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer yang berupa instrumen kuesioner dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018 dengan menyebarkan kuesioner yang berjumlah 150 kuesioner dan diberikan langsung kepada 30 Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo, antara lain sebagai berikut:

1. Kantor Pemerintah Desa Wahyuharjo
2. Kantor Pemerintah Desa Gulurejo
3. Kantor Pemerintah Desa Ngentakrejo
4. Kantor Pemerintah Desa Jatirejo
5. Kantor Pemerintah Desa Sidorejo
6. Kantor Pemerintah Desa Bumirejo
7. Kantor Pemerintah Desa Pendoworejo
8. Kantor Pemerintah Desa Giripurwo
9. Kantor Pemerintah Desa Wijimulyo

10. Kantor Pemerintah Desa Tanjungharjo
11. Kantor Pemerintah Desa Kembang
12. Kantor Pemerintah Desa Jatisarono
13. Kantor Pemerintah Desa Donomulyo
14. Kantor Pemerintah Desa Banyuroto
15. Kantor Pemerintah Desa Temon Wetan
16. Kantor Pemerintah Desa Temon Kulon
17. Kantor Pemerintah Desa Kedundang
18. Kantor Pemerintah Desa Kaligintung
19. Kantor Pemerintah Desa Kalidengen
20. Kantor Pemerintah Desa Demen
21. Kantor Pemerintah Desa Palihan
22. Kantor Pemerintah Desa Pengasih
23. Kantor Pemerintah Desa Sidomulyo
24. Kantor Pemerintah Desa Sendangsari
25. Kantor Pemerintah Desa Karang Sari
26. Kantor Pemerintah Desa Margosari
27. Kantor Pemerintah Desa Tuksono
28. Kantor Pemerintah Desa Sentolo
29. Kantor Pemerintah Desa Salamrejo
30. Kantor Pemerintah Desa Banguncipto

Pembagian kuesioner pada setiap Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo yaitu masing-masing 5 kuesioner dengan jumlah keseluruhan 150

kuesioner yang tersebar. Tingkat pengembalian kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

<b>Data Klasifikasi</b>	<b>Jumlah Kuesioner</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang tidak kembali	14	9,33%
Kuesioner yang kembali	136	90,67%
Kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak lengkap	13	8,67%
<b>Total kuesioner yang dapat dianalisis</b>	<b>123</b>	<b>82%</b>

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kuesioner berjumlah 136 kuesioner dengan persentase pengembalian 90,67%. Terdapat 13 kuesioner yang tidak dapat diolah sebagai data penelitian karena pengisian kuesioner yang tidak lengkap dengan persentase sebesar 8,67%. Selanjutnya, kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini berjumlah 123 kuesioner dengan persentase sebesar 82%.

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, dan lama bekerja di Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Responden**

<b>Keterangan</b>		<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Jenis kelamin	Laki-laki	85	69%
	Perempuan	30	24%
	Tidak mengisi	8	7%
Jumlah		123	100%
Umur	<20	1	1%
	20-35	28	23%
	36-50	38	31%
	>50	42	34%
	Tidak mengisi	14	11%
Jumlah		123	100%
Pendidikan	SD	0	0%
	SMP	1	1%
	SMA	54	43,9%
	S1	45	36,5%
	Lainnya	5	4%
	Tidak mengisi	18	14,6%
Jumlah		123	100%
Latar belakang pendidikan	Akuntansi	5	4,1%
	Manajemen	6	4,9%
	Ilmu Ekonomi	1	1%
	Lainnya	32	26%
	Tidak mengisi	79	64%
Jumlah		123	100%
Lama bekerja di Pemerintah Desa	<1 tahun	3	2,4%
	1-5 tahun	34	27,6%
	6-10	14	11,4%
	>10 tahun	57	46,3%
	Tidak mengisi	15	12,3%
Jumlah		123	100%

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

#### 1. Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 4.2 terdapat 123 responden dengan perbandingan jumlah responden laki-laki dan perempuan yaitu 69% dan 24% dari total responden. Responden laki-laki merupakan responden terbanyak yang

berjumlah 85 responden dan responden perempuan berjumlah 30 responden. Namun, ada 8 responden yang tidak melengkapi data responden dengan persentase sebesar 7%.

## 2. Umur

Berdasarkan Tabel 4.2 informasi terkait karakteristik umur responden dibagi menjadi empat yaitu responden dengan umur <20 tahun sebanyak 1 responden atau 1%, responden dengan rentang umur 20-35 tahun sebanyak 28 responden dengan persentase sebesar 23%, responden dengan umur antara 36-50 tahun sebanyak 38 dengan persentase sebesar 31%, responden dengan umur >50 tahun sebanyak 42 responden dengan persentase terbesar yaitu 34% dari total responden, dan terdapat 14 responden yang tidak mengisi dengan persentasenya 11%.

## 3. Pendidikan Terakhir dan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan Tabel 4.2 karakteristik pendidikan terakhir responden untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) tidak ada dengan persentase 0%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 responden dengan persentase sebesar 1%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 54 responden dengan persentase sebesar 43,9%, responden dengan pendidikan terakhir Sarjana strata satu (S1) sebanyak 45 responden dengan persentase sebesar 6,5%, lainnya sebanyak 5 responden dengan persentase sebesar 4%, terdapat 18 responden yang tidak diketahui jenjang pendidikannya dengan persentase sebesar 14,6%. Berdasarkan latar belakang pendidikan responden yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 5 responden dengan

persentase sebesar 4,1%, responden dengan latar belakang pendidikan manajemen sebanyak 6 responden dengan persentase sebesar 4,9%, responden yang berlatar belakang pendidikan ilmu ekonomi sebanyak 1 responden dengan persentase 1%, lainnya sebanyak 32 responden dengan latar belakang pendidikan beragam dengan persentase sebesar 26%, terdapat 79 responden yang tidak diketahui latar belakang pendidikannya karena pengisian yang kurang lengkap dengan persentase 64%.

#### 4. Lama Bekerja di Pemerintah Desa

Pada Tabel 4.2 berdasarkan lama bekerja di pemerintah desa yaitu responden yang lama bekerja di pemerintah desa <1 tahun sebanyak 3 responden dengan persentase 2,4%, responden yang lama bekerja di pemerintah desa 1-5 tahun sebanyak 34 dengan persentase sebesar 27,6%, lama bekerja 5-10 tahun sebanyak 14 responden dengan persentase sebanyak 11,4%, rata-rata responden sudah bekerja di pemerintah desa >10 tahun yaitu sebanyak 57 responden dengan persentase sebesar 46,3%, sedangkan 15 responden dengan persentase sebesar 12,3% tidak melengkapi data tersebut.

#### 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran atau deskriptif data penelitian, serta menjelaskan karakteristik data yang diteliti dalam bentuk tabel maupun grafik. Analisis statistik deskriptif menggambarkan karakteristik data yang dibutuhkan yaitu jumlah data, minimum, maximum, mean atau rata-rata, dan standar deviasi (*Std.*

*Deviation*) dari masing-masing variabel. Berikut hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian.

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Teoritis		Aktual		
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Std. Deviation
Kinerja pengelolaan keuangan desa	11-55	33	40-55	48,62	3,935
Kapasitas aparatur desa	7-35	21	23-35	29,20	2,556
Ketaatan regulasi	7-35	21	26-35	30,36	2,803
Kualitas pengawasan BPD	7-35	21	21-35	28,63	2,590
Pemanfaatan TI	5-25	15	17-25	21,37	2,070
Komitmen aparatur desa	5-25	15	12-25	21,22	2,404
Pendamping desa	5-25	15	7-25	19,76	2,567

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kinerja pengelolaan keuangan desa

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 11-55 dengan mean 33. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 40-55, mean sebesar 48,62 dengan standar deviasi sebesar 3,935. Hasil uji menunjukkan mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kulon Progo tinggi.

b. Kekapasitas aparatur desa

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 7-35

dengan mean 21. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 23-35, mean sebesar 29,20 dengan standar deviasi sebesar 2,556. Hasil uji menunjukkan mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kapasitas aparatur desa di Kabupaten Kulon Progo tinggi.

c. Ketaatan regulasi

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 7-35 dengan mean 21. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 26-35, mean sebesar 30,36 dengan standar deviasi sebesar 2,803. Hasil uji menunjukkan mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketaatan regulasi di Kabupaten Kulon Progo tinggi.

d. Kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 7-35 dengan mean 21. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 21-35, mean sebesar 28,63 dengan standar deviasi sebesar 2,590. Hasil uji menunjukkan mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kulon Progo tinggi.

e. Pemanfaatan teknologi informasi

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 5-25 dengan mean 15. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 17-

25, mean sebesar 21,37 dengan standar deviasi sebesar 2,070. Hasil uji menunjukkan mean aktual  $>$  mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Kulon Progo tinggi.

f. Komitmen aparatur desa

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 5-25 dengan mean 15. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 12-25, mean sebesar 21,22 dengan standar deviasi sebesar 2,404. Hasil uji menunjukkan mean aktual  $>$  mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata komitmen aparatur desa di Kabupaten Kulon Progo tinggi.

g. Pendamping desa

Pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 5-25 dengan mean 15. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 7-25, mean sebesar 19,76 dengan standar deviasi sebesar 2,567. Hasil uji menunjukkan mean aktual  $>$  mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata peran pendamping desa di Kabupaten Kulon Progo tinggi.

**Tabel 4.4**  
**Statistik Frekuensi**  
**Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Pernyataan KPKD	STS		TS		KS/N		S		SS	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
KPKD1	0	0	0	0	0	0	53	43,1	70	56,9
KPKD2	0	0	0	0	0	0	21	17,1	102	82,9
KPKD3	0	0	2	1,6	3	2,4	60	48,8	58	47,2
KPKD4	0	0	0	0	2	1,6	65	52,8	56	45,5
KPKD5	0	0	0	0	1	0,8	74	60,2	48	39,0
KPKD6	0	0	1	0,8	6	4,9	72	58,5	44	35,8
KPKD7	0	0	1	0,8	0	0	81	65,9	41	33,3
KPKD8	0	0	0	0	1	0,8	75	61,0	47	38,2
KPKD9	0	0	0	0	4	3,3	86	69,9	33	26,8
KPKD10	0	0	0	0	6	4,9	75	61,0	42	34,1
KPKD11	0	0	0	0	2	1,6	61	49,6	60	48,8

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan persentase frekuensi dari masing-masing item pertanyaan dari variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa yang dihasilkan dari jawaban responden yang berjumlah 123 responden. Responden yang menjawab pertanyaan pertama dengan Sangat Setuju (SS) berjumlah 70 responden atau 56.9%, Setuju (S) berjumlah 53 responden atau 43.1%, kemudian pilihan jawaban Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) tidak dipilih oleh reponden. Responden yang menjawab pertanyaan kedua dengan Sangat Setuju (SS) adalah 102 responden atau 82.9%, dan menjawab Setuju (S) berjumlah 21 responden atau 17.1%.

Responden menjawab pertanyaan ketiga dengan Sangat Setuju (SS) berjumlah 58 responden atau 47,2%, Setuju (S) berjumlah 60 responden atau

48.8%, Kurang Setuju (KS) berjumlah tiga responden atau 2.4%, dan menjawab Tidak Setuju (TS) berjumlah dua responden atau 1.6%. Responden yang menjawab pertanyaan keempat dengan Sangat Setuju (SS) berjumlah 56 responden atau 45.4%, Setuju (S) berjumlah 65 responden atau 52,8%, dan menjawab Kurang Setuju berjumlah dua responden atau 1.6%. Responden yang menjawab pertanyaan kelima dengan Sangat Setuju (SS) berjumlah 48 responden atau 39 %, Setuju (S) berjumlah 74 responden atau 60.2%, dan menjawab Kurang Setuju satu responden atau 0.8%. Pertanyaan keenam dengan pilihan jawaban Sangat Setuju berjumlah 44 responden atau 35.8%, Setuju (S) berjumlah 72 responden atau 58.5%, Kurang Setuju berjumlah enam responden atau 4.9%, dan memilih Tidak Setuju (TS) berjumlah satu responden atau 0.8%. Responden yang menjawab pertanyaan ketujuh dengan Sangat Setuju (SS) berjumlah 41 responden atau 33.3%, Setuju (S) berjumlah 81 responden atau 65.9%, dan yang memilih Tidak Setuju berjumlah satu responden atau 0.8%. Responden yang menjawab pertanyaan kedelapan dengan Sangat Setuju (SS) berjumlah 47 responden atau 38.2%, Setuju (S) berjumlah 75 responden atau 61%, dan menjawab Kurang Setuju berjumlah satu responden atau 0.8%.

Jumlah Responden untuk pertanyaan kesembilan dengan jawaban Sangat Setuju (SS) berjumlah 33 responden atau 26.8 %, Setuju (SS) berjumlah 86 responden atau 69.9%, dan menjawab Kurang Setuju (KS) berjumlah empat reponden atau 3.3%. Jumlah responden yang menjawab pertanyaan kesepuluh dengan Sangat Setuju (SS) berjumlah 42 responden

atau 34.1%, dengan jawaban Setuju (S) berjumlah 75 responden atau 61%, dan menjawab Kurang Setuju berjumlah enam responden atau 4.9%. Jumlah responden yang menjawab pertanyaan kesebelas dengan jawaban Sangat Setuju (SS) berjumlah 60 responden atau 48.8%, dengan Setuju (S) berjumlah 61 responden atau 49.6%, dan jumlah responden yang menjawab Kurang Setuju (KS) berjumlah dua responden atau 1.6%.

## B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

### 1. Uji Validitas

Pengujian ini diperlukan dalam penelitian yang menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan oleh peneliti. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan alat bantu statistik *Bivariate Correlation Pearson* untuk melihat korelasi antar item-item pertanyaan.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	r-hitung	Signifikansi	Keterangan
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	KPKD1	0,703	0,000	Valid
	KPKD2	0,474	0,000	Valid
	KPKD3	0,670	0,000	Valid
	KPKD4	0,824	0,000	Valid
	KPKD5	0,743	0,000	Valid
	KPKD6	0,711	0,000	Valid
	KPKD7	0,712	0,000	Valid
	KPKD8	0,732	0,000	Valid
	KPKD9	0,545	0,000	Valid
	KPKD10	0,608	0,000	Valid
	KPKD11	0,763	0,000	Valid
Kapasitas Aparatur Desa (X <sub>1</sub> )	KA1	0,803	0,000	Valid
	KA2	0,692	0,000	Valid
	KA3	0,722	0,000	Valid

Variabel	Pertanyaan	r-hitung	Signifikansi	Keterangan
	KA4	0,684	0,000	Valid
	KA5	0,719	0,000	Valid
	KA6	0,740	0,000	Valid
	KA7	0,742	0,000	Valid
Ketaatan Regulasi (X <sub>2</sub> )	KR1	0,720	0,000	Valid
	KR2	0,833	0,000	Valid
	KR3	0,823	0,000	Valid
	KR4	0,832	0,000	Valid
	KR5	0,740	0,000	Valid
	KR6	0,738	0,000	Valid
	KR7	0,842	0,000	Valid
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (X <sub>3</sub> )	BPD1	0,710	0,000	Valid
	BPD2	0,750	0,000	Valid
	BPD3	0,817	0,000	Valid
	BPD4	0,826	0,000	Valid
	BPD5	0,691	0,000	Valid
	BPD6	0,637	0,000	Valid
	BPD7	0,670	0,000	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>4</sub> )	TI1	0,726	0,000	Valid
	TI2	0,744	0,000	Valid
	TI3	0,844	0,000	Valid
	TI4	0,852	0,000	Valid
	TI5	0,770	0,000	Valid
Komitmen Aparatur Desa (X <sub>5</sub> )	KO1	0,805	0,000	Valid
	KO2	0,878	0,000	Valid
	KO3	0,809	0,000	Valid
	KO4	0,920	0,000	Valid
	KO5	0,713	0,000	Valid
Pendamping Desa (X <sub>6</sub> )	PD1	0,780	0,000	Valid
	PD2	0,881	0,000	Valid
	PD3	0,849	0,000	Valid
	PD4	0,810	0,000	Valid
	PD5	0,845	0,000	Valid

(Sumber: data primerdiolah oleh peneliti 2019)

Tabel 4.4 di atas merupakan hasil uji validitas dari masing-masing variabel dalam penelitian yaitu variabel kinerja pengelolaan keuangan desa, kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan

badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa. Seluruh item-item pertanyaan dari instrumen penelitian memiliki nilai *Pearson Correlation* pada r-hitung  $\geq 0,25$  maka seluruh item instrumen dikatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat bantu statistik yang digunakan untuk mengetahui konsistensi data yang diteliti dapat digunakan lebih dari satu kali pengukuran. Metode *Cronbach's Alpha* dipakai pada uji reliabilitas penelitian ini. Menurut Sugiyono (2014) data dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* pada uji reliabilitas lebih besar sama dari 0,60. Berikut hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
KPKD (Y)	0,885	Reliabilitas tinggi
KA (X <sub>1</sub> )	0,851	Reliabilitas tinggi
KR (X <sub>2</sub> )	0,900	Reliabilitas tinggi
BPD (X <sub>3</sub> )	0,850	Reliabilitas tinggi
TI (X <sub>4</sub> )	0,849	Reliabilitas tinggi
KO (X <sub>5</sub> )	0,878	Reliabilitas tinggi
PD (X <sub>6</sub> )	0,887	Reliabilitas tinggi

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 yang artinya reliabilitas tinggi, sehingga instrumen penelitian pada setiap variabel memiliki konsistensi pada setiap item pertanyaannya maka kuesioner dapat digunakan lebih dari sekali.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu harus melakukan uji asumsi klasik pada hipotesis dan data yang akan digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang digunakan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal atau tidak. Uji statistik normalitas dilihat dari nilai residualnya, data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Unstandardized Residual* pada *Kolmogorov-Smirnov(K-S)* lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 atau nilai signifikan besar dari 0,05. Sebaliknya data dikatakan berdistribusi tidak normal apabila nilai residual lebih kecil dari *alpha* 0,05.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	,877
Asymp. Sig. (2-tailed)	,425

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji normalitas dari data penelitian yang memiliki nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,425 > *alpha* 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan menggunakan statistika parametrik.

#### b. Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Alat statistik yang digunakan pada pengujian multikolinearitas adalah *Variance Inflation Faktor (VIF)*, nilai VIF harus lebih kecil dari 10 atau nilai *tolerance* besar dari 0,1. Jika nilai VIF > 10 dapat dikatakan mengandung multikolinearitas maka variabel harus diganti atau dikeluarkan.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas Aparatur Desa	0,444	2,253	Bebas multikolinearitas
Ketaatan Regulasi	0,300	3,331	Bebas multikolinearitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,539	1,855	Bebas multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,593	1,687	Bebas multikolinearitas
Komitmen Aparatur Desa	0,514	1,944	Bebas multikolinearitas
Pendamping Desa	0,646	1,548	Bebas multikolinearitas

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Hasil dari uji multikolinearitas bisa dilihat di Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Faktor (VIF)* < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen dan model regresi yang digunakan tidak mengandung multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya ketidaksamaan varians pada model regresi dari residual untuk semua pengamatan. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser yaitu meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen

pada permasalahan regresi. Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
Kapasitas Aparatur Desa	0,929	Homoskedastisitas
Ketaatan Regulasi	0,780	Homoskedastisitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,869	Homoskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,923	Homoskedastisitas
Komitmen Aparatur Desa	0,322	Homoskedastisitas
Pendamping Desa	0,635	Homoskedastisitas

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Syarat terpenuhinya uji heteroskedastisitas apabila nilai absolut residual sig. lebih besar dari  $\alpha$  0,05, maka dapat diasumsikan tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen. Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai sig.  $>\alpha$  0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen terbebas dari heteroskedastisitas.

### **C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)**

Untuk menguji pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	B	t-hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	11,458	3,484	0,001	
KA	0,467	3,393	0,001	Signifikan positif
KR	0,685	4,491	0,000	Signifikan positif
BPD	0,041	0,334	0,739	Tidak Signifikan
TI	0,058	0,395	0,693	Tidak Signifikan
KO	-0,105	-0,772	0,441	Tidak Signifikan
PD	0,129	1,139	0,257	Tidak Signifikan

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Rumus regresi pada penelitian ini berdasarkan Tabel 4.10 adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,458 + 0,467X_1 + 0,685X_2 + 0,041X_3 + 0,058X_4 - 0,105X_5 + 0,129X_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja pengelolaan keuangan desa

X<sub>1</sub> = Kapasitas aparatur desa

X<sub>2</sub> = Ketaatan regulasi

X<sub>3</sub> = Kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa

X<sub>4</sub> = Pemanfaatan teknologi informasi

X<sub>5</sub> = Komitmen aparatur desa

X<sub>6</sub> = Pendamping desa

$\varepsilon$  = Error of estimation

### 1. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinan merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat persentase kecocokan model atau menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian ini dilihat dari nilai Adjusted R Square dimana nilai tersebut mampu menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinan yang diakumulasikan dalam persentase.

**Tabel 4.11**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,768(a)	,589	,568	2,587

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Besar pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ditunjukkan oleh nilai *Adjusted RSquare* sebesar 0,568. Artinya 56,8% kinerja pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa. Sedangkan, sisanya sebesar 43,2% berasal (100%-56,8%) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## 2. Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Efilia, 2011). Variabel independen dikatakan dapat mempengaruhi variabel dependen dengan kriteria pengujian nilai signifikan  $> \alpha 0,05$ .

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Signifikan Silmultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1112,795	6	185,466	27,715	,000(a)
	Residual	776,246	116	6,692		
	Total	1889,041	122			

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai F-hitung sebesar 27,715 dengan nilai signifikan 0,000  $< \alpha 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi,

komitmen aparatur desa, dan pendamping desa secara simultan berpengaruh signifikan pada perubahan kinerja pengelolaan keuangan desa.

### 3. Uji Parsial (uji t)

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,458	3,289		3,484	,001
	Kapasitas Aparatur Desa	,467	,138	,303	3,393	,001
	Ketaatan Regulasi	,685	,153	,488	4,491	,000
	Kualitas Pengawasan BPD	,041	,123	,027	,334	,739
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,058	,147	,031	,395	,693
	Komitmen Aparatur Desa	-,105	,136	-,064	-,772	,441
	Pendamping Desa	,129	,113	,084	1,139	,257

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas diketahui hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai B (beta) pada tabel *Cnstandardized coefficients* dan nilai signifikansi dari setiap variabel independen, berikut penjelasan dari masing-masing variabel:

a. Uji hipotesis pertama ( $H_1$ )

Berdasarkan uji parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,393 koefisien regresi 0,467 dengan signifikansi sebesar 0,001. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai signifikansi  $\leq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Ini menunjukkan semakin tinggi atau baik kapasitas aparatur desa otomatis dapat meningkatkan kualitas kinerja

pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **diterima**.

b. Uji hipotesis kedua ( $H_2$ )

Berdasarkan uji parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,491 koefisien regresi 0,685 dengan signifikansi 0,000. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai signifikansi  $\leq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketaatan terhadap regulasi atau peraturan terkait pengelolaan keuangan desa yang berlaku dapat meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke dua **diterima**.

c. Uji hipotesis ke tiga ( $H_3$ )

Berdasarkan uji parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,334 koefisien regresi 0,041 dengan signifikansi 0,739. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai signifikansi  $\geq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa baiknya kualitas pengawasan dari badan permusyawaratan desa belum mampu meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke tiga **ditolak**.

d. Uji hipotesis ke empat ( $H_4$ )

Berdasarkan uji parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,395 koefisien regresi 0,058 dengan signifikansi 0,395. Berdasarkan hasil olah data dimana

nilai signifikan  $\geq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan teknologi informasi belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke empat **ditolak**.

e. Uji hipotesis ke lima ( $H_5$ )

Berdasarkan uji parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,105 koefisien regresi -0,772 dengan signifikansi 0,441. Berdasarkan olah data dimana nilai signifikan  $\geq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa komitmen aparatur desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya komitmen aparatur desa belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke lima **ditolak**.

f. Uji hipotesis ke enam ( $H_6$ )

Berdasarkan uji parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,139 koefisien regresi 0,129 dengan signifikansi 0,257. Berdasarkan olah data dimana nilai signifikan  $\geq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa pendamping desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan desa belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke enam **ditolak**.

**Tabel 4.14**  
**Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

<b>Kode</b>	<b>Hipotesis</b>	<b>Hasil</b>
Ha <sub>1</sub>	Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa	<b>Diterima</b>
Ha <sub>2</sub>	Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa	<b>Diterima</b>
Ha <sub>3</sub>	Kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa tidak berpenbaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	<b>Ditolak</b>
Ha <sub>4</sub>	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	<b>Ditolak</b>
Ha <sub>5</sub>	Komitmen aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	<b>Ditolak</b>
Ha <sub>6</sub>	Pendamping desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	<b>Ditolak</b>

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti 2019)

#### **D. Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa di Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen. Terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh positif pada kinerja pengelolaan keuangan desa. Berikut pembahasan dan analisis mengenai beberapa faktor tersebut:

- 1. Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Hasil pengujian yang pertama dilakukan pada variabel kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa memberikan hasil positif signifikan yang diketahui bahwa semakin tinggi kapasitas yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin baik kinerja pengelolaan keuangan desa yang dihasilkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, karena nilai signifikan kurang dari alpha dan memberikan pengaruh positif. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyo dan Muis (2015), Jalil (2017) juga telah menjelaskan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa serta memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa dijalankan oleh aparatur desa yang menjadi *steward* dan memiliki peranan penting dalam memenuhi kewajiban dan kewenangan yang dipegang oleh aparatur desa guna terwujudnya tujuan pemerintahan itu sendiri. Demi mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam menjalankan setiap kegiatan dan program pemerintah. Maka dari itu, aparatur desa dituntut untuk memiliki kemampuan, pemahaman, keterampilan dan pengetahuan di bidang masing-masing. Dengan demikian, aparatur desa dapat memberikan kinerja yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil data responden yang rata-rata aparatur desa di Kabupaten Kulon Progo memiliki latar belakang pendidikan yaitu dengan pendidikan terakhir tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Responden yang memiliki latar belakang pendidikan SMA dari 123 responden yaitu sebesar 43,9 % atau 54 responden dan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dengan persentase 36,5% atau 45 responden. Walaupun tingkat pendidikan aparatur desa yang rata-rata adalah SMA, akan tetapi mayoritas aparatur desa telah memahami dengan baik terkait pengelolaan keuangan desa. Karena rata-rata aparatur desa telah bekerja lebih dari 10 tahun di Pemerintah Desa, sehingga hal tersebut didukung oleh pengalaman bekerja tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2016) yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor penghambat terhadap pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan kurangnya pelatihan. Penelitian oleh Rafar *et. al* (2015) yang membuktikan bahwa sumber daya manusia yang berada di instansi pemerintah membutuhkan latar belakang yang profesional di bidang akuntansi.

Dari hasil penelitian ini, karena rata-rata aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan tingkat SMA. Maka pemerintah desa membutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi latar belakang yang tinggi. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat ditangani oleh sumber daya yang handal, sehingga menghasilkan

kualitas laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Pengaruh ketaatan regulasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Pengujian kedua dilakukan pada variabel ketaatan regulasi yang diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima, karena ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Maka semakin tinggi ketaatan aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku otomatis akan menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik dan sesuai standar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Munti dan Fahlevi (2017) yang juga menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Ketaatan regulasi merupakan sikap atau tanggungjawab organisasi untuk bersedia mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan. Dimuat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal ini kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa berkewajiban mengikuti pedoman dengan berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa guna terwujudnya laporan keuangan yang andal dan transparan, sehingga tujuan pemerintah dan hak masyarakat dapat terpenuhi.

Pengelolaan keuangan desa berpotensi menimbulkan masalah yang mana laporan pertanggungjawaban keuangan desa dibuat tidak sesuai standar yang berakibat terjadinya manipulasi dan kurangnya transparansi anggaran terhadap laporan keuangan tersebut (Prasetyo dan Muis, 2015). Dalam kenyataan perencanaan desa tidak sesuai dengan harapan karena penyusunan anggaran dibuat dengan waktu yang singkat sehingga dokumen tersebut dibuat secara elitis dan hanya segelintir masyarakat desa yang ikut serta. Hal ini tentu berlawanan dengan harapan pemerintah bahwa perencanaan desa seharusnya dilakukan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Aktualnya apa yang tertuang dalam rencana anggaran tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka peran pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan keuangan desa mulai dari pembuatan perencanaan anggaran maupun pertanggungjawaban dengan adanya keterbukaan mulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta laporan akhir dengan keikutsertaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat berperan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat merencanakan anggaran begitupun program atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas yang telah dimuat didalamnya sehingga pemerintah sebagai *steward* dapat mematuhi dan memberikan kinerja dengan sebaik mungkin dengan melaporkan hasil kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### **3. Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Pengujian ketiga dilakukan pada variabel kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa tidak berpengaruh pada kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak, bahwa tinggi rendahnya kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa belum mampu memberikan berpengaruh besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Mondale *et. al*(2017) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi atau

kualitas sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat dan pengawasan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan atau lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa. Fungsi dari BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja perangkat desa. Selain itu, BPD juga memiliki hak untuk menyelenggarakan musyawarah desa apabila diperlukan. Peran pengawasan BPD sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, dimana BPD harus memastikan apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana awal dan memastikan realisasi program sudah berjalan semestinya. Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kemampuan dalam menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis desa agar dapat meminimalisir penyimpangan. Oleh karena itu, peran dan tugas BPD menjadi sangat penting sehingga masyarakat menaruh harapan agar BPD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.

Kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan wewenang BPD masih belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden yang menyatakan bahwa BPD belum mampu melaksanakan pengawasan secara bertahap maupun pengawasan rutin. Selain itu,

BPD masih belum melaksanakan perbaikan jika terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam kegiatan dan program desa. Mengingat BPD memegang peranan penting dalam sistem pemerintah desa, untuk itu BPD perlu berbenah agar fungsi dan tugas yang diemban dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Prasetyo dan Muis (2015) yang menyatakan bahwa perlu adanya penguatan Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan internal (aparatur desa) dalam pengelolaan keuangan desa. Fungsi pengawasan BPD sudah dijelaskan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimana BPD bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan dan menjadi perwakilan bagi masyarakat dalam penyaluran aspirasi kepada pemerintah.

#### **4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Pengujian keempat dilakukan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak, bahwa tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi belum memberikan pengaruh kepada kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Andriyani (2017) juga telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan desa. Berdasarkan penelitian Nasir dan Oktari (2017) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam organisasi swasta maupun pemerintah, yaitu tingginya tingkat kompleksitas tugas manajemen, pengaruh dari ekonomi global, tuntutan terhadap efisiensi waktu kerja, dan tekanan persaingan bisnis (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Pada perkembangan teknologi akan selalu memberikan kemudahan bagi berbagai pihak pengguna termasuk pemerintah untuk mengenalkan teknologi informasi kepada masing-masing pemerintah desa dengan memberikan fasilitas pembekalan, pelatihan dan pengadaan perangkat begitu juga jaringan internet agar dapat mempermudah tugas aparatur. Dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan pemerintah mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi penyediaan informasi begitu juga pemenuhan kewajiban aparatur desa kepada pemerintah di atasnya.

Penggunaan teknologi informasi saat ini pada pemerintah desa sudah dinilai baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketersediaan perangkat komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa dan ketersediaan jaringan internet. Akan tetapi, tingkat optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan

publik di instansi pemerintah desa relatif kurang optimal. Karena dalam pelaksanaannya aparatur desa masih belum menggunakan teknologi informasi tersebut untuk kemudahan pengiriman data maupun informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, aparatur desa masih belum memaksimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa seperti *Microsoft Excel* atau aplikasi lainnya. Dari hasil analisis penelitian juga membuktikan bahwa proses akuntansi dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan di desa masih belum berbasis komputerisasi sehingga kinerja yang dihasilkan tidak maksimal.

Dengan adanya teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam pekerjaan tetapi juga sebagai media komunikasi. Pemanfaatan sistem informasi yang efektif dapat memberikan dampak pada kinerja yang dihasilkan oleh pihak internal pemerintah kepada pihak eksternal atau masyarakat sebagai prinsipal dalam perolehan informasi mengenai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Penggunaan jaringan internet salah satu solusi bagi pemerintah dalam penyediaan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat terkait keuangan desa yang tentunya membutuhkan komputerisasi yang memadai. Dimuat dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi guna penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan di desa.

## **5. Pengaruh komitmen aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Pengujian kelima dilakukan pada variabel komitmen aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian mengasilkan bahwa komitmen aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak, bahwa tinggi rendahnya komitmen yang dimiliki aparatur desa belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fitriana (2015) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia, informasi keuangan desa dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengeolaan keuangan desa.

Hasil penelitian dari Mada *et. al* (2017) juga membuktikan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akutabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut tidak sejalan dengan kenyataan yang mana aparatur desa belum cukup memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Sebagaimana dibuktikan oleh Kurniawan (2011) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak bahwa komitmen organisai tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik.

Lingkungan kerja yang profesional dapat dibentuk dengan adanya komitmen yang tinggi dari suatu organisasi. Kinerja yang dicapai suatu organisasi ditentukan dengan tinggi rendahnya komitmen

yang dimiliki oleh karyawan dalam organisasi tersebut. Individu dengan komitmen yang tinggi pada organisasi maka individu tersebut akan memiliki kepedulian akan nasib organisasi tersebut dan akan berusaha untuk mewujudkan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga penurunan kinerja dapat dihindari. Sementara itu, individu yang tidak memiliki komitmen dalam organisasi cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak mengusahakan organisasi kearah yang lebih baik yang berakibat pada penurunan kinerja.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa komitmen aparatur desa di Kabupaten Kulon Progo masih belum cukup untuk meningkatkan kinerja keuangan di pemerintah desa. Rendahnya komitmen aparatur dilihat dari kurangnya kepedulian terhadap tugas dan fungsi mereka terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparatur desa belum sepenuhnya mengupayakan agar tujuan pemerintah desa dapat tercapai. Menurut Lubis (2010) menjelaskan bahwa organisasi dengan komitmen yang tinggi merupakan tingkat keberpihakan seorang individu kepada tujuan organisasi serta mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Akan tetapi, kesetiaan aparatur desa terhadap pemerintah desa dengan tidak bekerja di organisasi lain masih dipertanyakan.

## **6. Pengaruh pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Pengujian keenam dilakukan untuk variabel pendamping desa pada kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendamping desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis keenam ditolak, karena dengan adanya pendamping desa belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Menurut Jalil (2017) membuktikan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Begitu juga dengan hasil penelitian Prasetyo dan Muis (2015) bahwa dari sisi sumber daya manusia, kompetensi kepala desa dan pendamping desa menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Pendamping desa memegang peran sebagai aktor ditingkat masyarakat dalam hal pengawalan pengelolaan keuangan desa. Pendamping desa menjadi fasilitator untuk pemerintah dan masyarakat desa agar kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan efektif demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat pendamping desa adalah aspek krusial dalam menentukan terjaminnya pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Maka kualifikasi yang tinggi harus dimiliki oleh pendamping desa. Oleh

karena itu, pendamping desa harus memiliki kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan sekurang-kurangnya dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan usaha ekonomi, serta sebagai penengah masyarakat desa dalam mencapai kata mufakat dengan kepekaan tentang kebiasaan adat istiadat yang ada didalam masyarakat (Pasal 24 Permendes PDTT No.3 Tahun 2015).

Instrumen kebijakan tentang pendamping desa diatur cukup ideal secara normatif, namun tidak menutup bahwa isu pendamping desa bebas dari masalah dan risiko. Berdasarkan hasil penelitian widiyarta (2017) yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur membuktikan bahwa terjadi mal-administrasi dalam proses rekrutmen tenaga pendamping desa profesional yang tidak sesuai dengan standar. Sementara itu, keberadaan pendamping desa profesional sangat diperlukan dalam pemanfaatan dana desa agar bisa tepat sasaran yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa. Fakta menunjukkan bahwa keberadaan pendamping desa masih jauh dari harapan pemerintah begitupun masyarakat. Hal tersebut diakui oleh aparatur desa maupun masyarakat desa. Berdasarkan analisa yang dilihat dari jawaban responden yang rata-rata menjawab netral pada pertanyaan penyangkut pendamping desa. Peran pendamping desa dalam penyampaian informasi mengenai keuangan desa belum dilakukan dengan baik. Tugas pendamping desa dalam pembinaan, pengarahan, dan pelatihan juga belum dilakukan secara maksimal. Terkait pengawasan dan

penilaian dari pendamping desa dirasa aparaturnya masih jauh dari harapan.

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kewenangan pendamping desa di hampir setiap proses dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dampak yang tinggi. Oleh karena itu, pendamping desa diwajibkan untuk mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi. Syarat kualifikasi yang tinggi harus dipenuhi oleh pendamping desa, yang berarti setiap pendamping desa harus memiliki kualitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendes PDTT No.3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, menyatakan bahwa tujuan dari pendamping desa adalah (1) meningkatkan kapasitas serta efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan, (2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, (3) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor, (4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatori. Dengan demikian, pendamping desa dituntut untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif.